

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang selalu dihadapi oleh setiap negara dan dianggap sebagai isu yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Setiap negara pasti akan berusaha dalam mengatasi kemiskinan, terutama di negara berkembang. Kemiskinan menghambat pembangunan suatu negara untuk mencapai kestabilan ekonomi yang sejahtera. Tingginya angka kemiskinan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat untuk melaksanakan program pemberantasan kemiskinan, yang secara tidak langsung dapat menghambat pembangunan ekonomi. Di Indonesia juga kemiskinan telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang tertinggal menjadikan tantangan dalam mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut (Sari, 2019).

Salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi adalah pemerintah Indonesia melakukan peningkatan pada tingkat daerah. Dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah membuat rencana yang membahas mengenai pokok bahasan tentang pembangunan daerah. Rencana itu mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan untuk nasional disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Prioritas pembangunan ekonomi daerah mencakup masalah-masalah yang dihadapi di wilayah tersebut dan solusi yang diusulkan akan dijelaskan dalam rencana untuk lima tahun ke depan sebagai strategi jangka menengah, serta untuk dua puluh

tahun ke depan sebagai arah jangka panjang. Salah satu dari prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah atau nasional adalah masalah kemiskinan.

Laporan Badan Pusat Statistik (2024) menyatakan bahwa garis kemiskinan nasional pada bulan September sebesar Rp 595.242 ribu. Dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidupnya di bawah garis kemiskinan yakni pada tahun 2024 sebanyak 74,50% dari total penduduk di Indonesia. Namun, terdapat disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,34%, sementara di perkotaan hanya 6,66% tercatat pada bulan September 2024. Berikut ini merupakan populasi penduduk miskin di enam provinsi yang ada di Pulau Jawa selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
di Pulau Jawa Periode 2015-2024**

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	368,67	4.485,65	4.505,78	485,56	4.775,97	690,67
2016	385,84	4.168,11	4.493,75	488,83	4.638,53	657,74
2017	393,13	3.774,41	4.197,49	466,33	4.405,27	699,83
2018	372,26	3.539,40	3.867,42	450,25	4.292,15	668,74
2019	362,30	3.375,89	3.679,40	440,89	4.056,00	641,42
2020	496,84	4.188,52	4.119,93	503,14	4.585,97	857,64
2021	498,29	4.004,86	3.934,01	474,49	4.259,60	852,28
2022	494,93	4.053,62	3.858,23	463,63	4.236,51	829,66
2023	477,83	3.888,60	3.791,50	448,47	4.188,81	826,13
2024	449,07	3.668,35	3.396,34	430,47	3.893,82	777,49

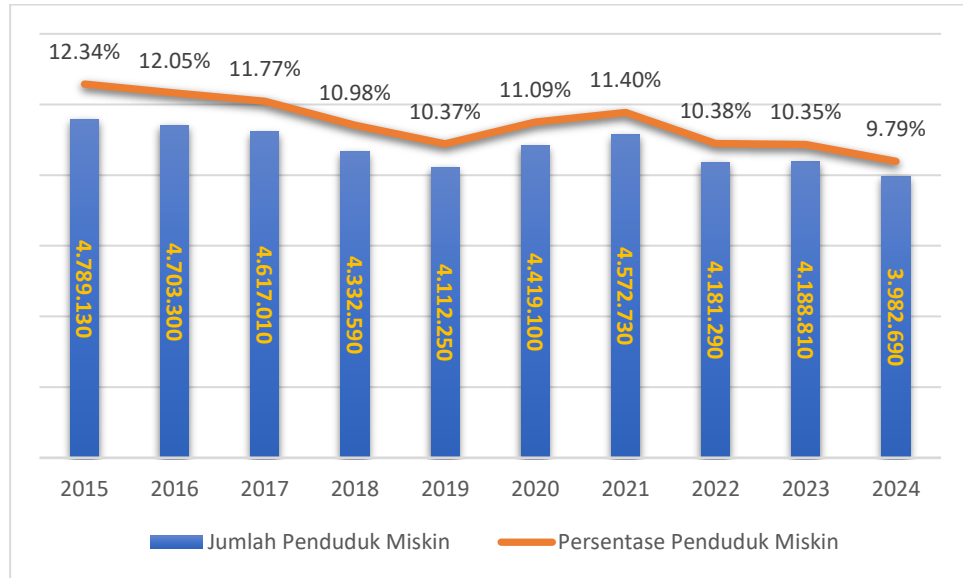
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2024

Data pada Tabel 1.1 di atas menggambarkan perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 hingga 2025 yang memperlihatkan skala perbandingan antar provinsi yang berada di pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik (2024) pada awal periode, terdapat tiga jumlah penduduk miskin terbesar

yaitu Jawa Timur sebanyak 4,78 juta jiwa, Jawa Tengah sebanyak 4,51 juta, dan Jawa Barat sebanyak 4,49 juta yang menyumbang lebih dari 70 % total orang miskin di pulau ini. Sedangkan DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten berada jauh di bawah angka satu juta. Selama lima tahun pertama angka kemiskinan turun perlahan di seluruh provinsi, tetapi guncangan pandemi 2020 memicu lonjakan serempak seperti DKI naik dari 0,36 juta ke 0,50 juta, Jawa Barat melompat ke 4,19 juta, dan Jawa Timur kembali menembus 4,59 juta. Seiring pemulihan ekonomi, semua provinsi kembali ke tren menurun, namun hingga 2024 Jawa Timur masih memegang rekor populasi miskin tertinggi sebesar 3,89 juta, diikuti Jawa Barat sebesar 3,67 juta dan Jawa Tengah sebesar 3,40 juta, sementara provinsi lain tetap di bawah satu juta. Akan tetapi Jawa Timur menempati PDRB terbesar kedua nasional dan belanja bantuan sosial tetapi mengapa penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berjalan lebih lambat dibanding dengan pulau lainnya di pulau Jawa meskipun daya dukung fiskal dan pertumbuhan ekonominya tinggi.

Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk yang tinggi. Jika disertai dengan kualitas yang memadai, hal ini juga dapat menjadi modal yang kuat untuk pembangunan. Namun, jika kualitas sumber daya manusia rendah juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan. Mereka yang tidak memiliki lahan atau alat produksi sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah (Rachmawati, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi, dan sinergis untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Selain itu, persentase penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar daerah.



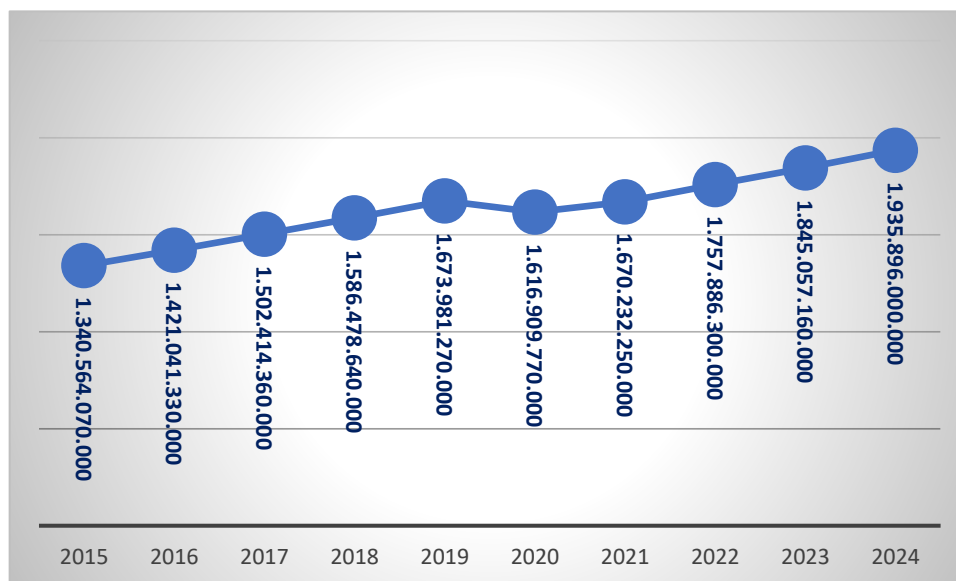
Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) 2024, diolah

Gambar 1. 1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 2015-2024

Grafik Gambar 1.1 di atas yang ditampilkan menunjukkan tren penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2024. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,34% atau sekitar 4.783.380 jiwa, dan mengalami penurunan secara konsisten hingga mencapai 9,79% atau sekitar 3.926.030 jiwa pada tahun 2024. Meski terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, tren secara keseluruhan tetap menunjukkan arah penurunan yang positif. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di Jawa Timur (BPS, 2024).

Di setiap wilayah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang bervariasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi persentase kemiskinan. Salah satu wilayah yang aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa dan Surabaya sebagai ibu kotanya. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 3.982.690 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 870 jiwa per km². Wilayah Provinsi ini secara umum terbagi menjadi dua bagian utama: daratan Jawa Timur dan Pulau Madura. Daratan Jawa Timur mencakup sekitar 90% dari total luas provinsi, sedangkan Pulau Madura hanya sekitar 10%. Dengan total luas mencapai 47.799,75 km², Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota (Azizah, 2018).

Menurut teori *Kuznet* penelitian Tambunan (2003), Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat. Pada tahap awal proses pembangunan ekonomi di suatu daerah, tingkat kemiskinan biasanya cenderung meningkat. Namun, saat pembangunan mendekati tahap akhir, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan akan mulai berkurang secara bertahap. Indikator yang signifikan untuk memahami kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah dari sudut pandang ekonomi. Misalnya, peningkatan PDRB dapat berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tertentu (Sudiana, 2015).



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Gambar 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2024**

Dapat dilihat Gambar 1.2 di atas menggambarkan menunjukkan tren yang cenderung meningkat secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, total PDRB Jatim berada di angka Rp1.340 triliun kemudian naik setiap tahun hingga mencapai Rp1.935 triliun pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan kecil pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 di mana PDRB turun dari Rp1.673 triliun ditahun 2019 menjadi Rp1.616 triliun ditahun 2020, namun secara umum tren pertumbuhan ekonomi daerah tetap positif. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Jawa Timur dalam menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan yang stabil (BPS, 2024).

Dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan, teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka

kemiskinan. Tren peningkatan PDRB di Jawa Timur dalam jangka panjang seharusnya berdampak pada penurunan kemiskinan, terutama jika pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan merata di berbagai kabupaten/kota.

Hal ini diperkuat oleh beberapa temuan penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian oleh Syaifudin & Prayitno (2020), yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, artinya semakin tinggi PDRB maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Selain itu, studi oleh Rofik & Widodo (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, terutama jika disertai dengan peningkatan sektor UMKM dan infrastruktur wilayah. Penelitian lain oleh Widodo (2022) juga menekankan bahwa pertumbuhan PDRB tanpa disertai pemerataan (misalnya pengurangan ketimpangan dan perluasan lapangan kerja) tidak akan secara optimal menurunkan kemiskinan, menunjukkan pentingnya peran kebijakan distribusi dalam mendukung efek PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain PDRB, Belanja Bantuan Sosial juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta

pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil, di samping program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan ini, diperlukan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung program pemerataan ekonomi nasional, pemerintah daerah berusaha untuk mendorong pemerataan ekonomi di daerah mereka. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi dari APBD pada tahun 2015 mencapai Rp 16,903 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp 29,439 triliun pada tahun 2024. Demikian juga, belanja bantuan sosial yang awalnya sebesar Rp 279 miliar pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 439 miliar pada tahun 2024 (Ramdani, 2024).

**Tabel 1. 2 Belanja Bantuan Sosial
Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2015-2024**

Tahun	Belanja Bantuan Sosial (Milyar)
2015	466.459.893.310
2016	477.489.312.717
2017	580.125.164.351
2018	1.342.667.920.000
2019	3.757.814.280.000
2020	703.030.400.000
2021	8.281.084.200.000
2022	7.236.114.000.000
2023	7.128.405.400.000
2024	7.083.693.000.000

Sumber : DJPK Kemenkeu, diolah

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, belanja bantuan sosial tercatat sebesar Rp466 miliar, dan secara bertahap meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp8,28 triliun. Peningkatan drastis mulai terjadi sejak tahun 2018, dengan lonjakan tajam pada tahun 2019 yang mencapai Rp3,75 triliun, serta tahun 2021 yang menjadi tahun tertinggi selama satu dekade terakhir. Peningkatan ini utamanya didorong oleh kebijakan pemerintah dalam merespons kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, yang memerlukan perluasan program bantuan sosial secara masif. Namun, tren tersebut mulai menurun pada tahun 2022 hingga 2024 dan cenderung stabil di angka Rp7 triliun. Secara teori, belanja bantuan sosial seharusnya berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan daya beli, memperluas akses kebutuhan dasar, dan melindungi kelompok rentan.

Hal ini sejalan dengan temuan dari Ansari et al. (2025) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan ketika dilakukan secara tepat sasaran, terutama dalam konteks pandemi. Dalam konteks yang lebih luas, Nopiah et al. (2024) juga menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk bantuan sosial akan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan jika dikombinasikan dengan program yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan.

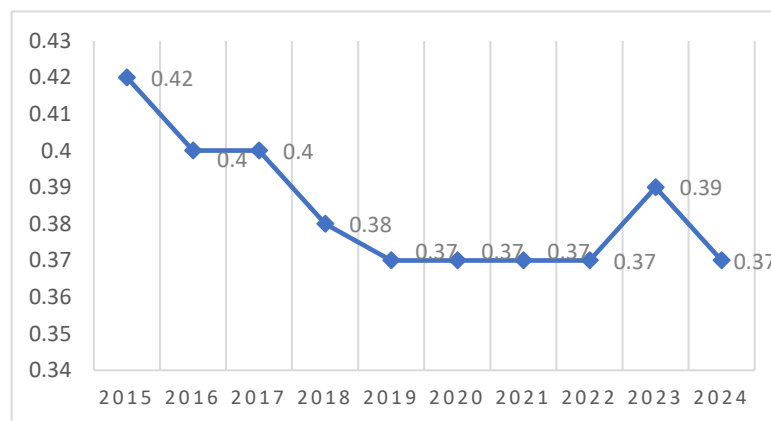
Hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam sebuah rumah tangga disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diterima. Kondisi kemiskinan yang memburuk akan menyebabkan peningkatan jumlah anggota keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Menurut Sugiyarto (2016)

terdapat hubungan pragmatis antara ketimpangan dan kemiskinan, yaitu kemiskinan merupakan akibat dari ketimpangan tersebut. Sedangkan ketimpangan di beberapa daerah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan migrasi, tindakan kriminal, dan konflik antar warga (Fahrizal, 2019).

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran dari kelompok 40 persen penduduk terbawah, yang dikenal sebagai ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori: ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 hingga 17 persen, dan ketimpangan rendah jika angkanya di atas 17 persen. Pada Maret 2022, persentase pengeluaran untuk kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan menurut ukuran Bank Dunia di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2021, yang mencapai 18,95 persen.

Dari gambar di bawah ini menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur yang cukup signifikan sepanjang tahun 2015 hingga 2024. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa ketimpangan cenderung menurun dari tahun 2015 sebesar 0,42 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019-2022 sebesar 0,37. Namun, pada tahun 2023 ketimpangan sempat naik kembali ke angka 0,39 sebelum akhirnya kembali menurun ke 0,37 di tahun 2024. Penurunan ketimpangan distribusi pendapatan ini berpotensi berkorelasi dengan penurunan

tingkat kemiskinan pada periode yang sama terutama antara tahun 2015 hingga 2019.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 1. 3 Gini Rasio Provinsi Jawa Timur

Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata dapat berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, karena kelompok pendapatan bawah mendapat akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi. Namun, lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 yang disertai dengan peningkatan tingkat kemiskinan memperkuat asumsi bahwa ketimpangan yang tinggi berasosiasi dengan peningkatan kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Studi oleh Handayani & Martani (2023), menemukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan Gini Ratio berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sementara itu, penelitian oleh Wulandari & Ramadhan (2022), juga mengonfirmasi bahwa semakin besar ketimpangan, maka semakin sulit program pengentasan kemiskinan mencapai target, karena pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati oleh kelompok pendapatan atas. Selain itu, menurut

Nugroho & Harjanti (2021) ketimpangan pendapatan merupakan faktor yang memperlambat dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan, sehingga redistribusi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas belanja publik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat beberapa jurnal yang bisa memperkuat alasan mengapa variabel Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Bantuan Sosial, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Pertama, pendapat Asnita (2022) dalam penelitiannya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penurunan angka kemiskinan bersifat tidak langsung dan tergantung pada distribusi sumber daya dari penduduk kaya kepada penduduk miskin. Jika kaum miskin hanya memperoleh sedikit keuntungan dari peningkatan PDRB, maka penurunan kemiskinan hanya akan berkurang sedikit. Kedua, menurut penelitian Rizki (2023) salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi adalah variabel pengeluaran untuk bantuan sosial. Terakhir, dari penelitian Khoirudin (2022) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah kemiskinan, yang terjadi jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan minimum ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan di masyarakat yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan yang ada, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan berkurang.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa *research gap* yang menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap variabel-variabel yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Meskipun pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren positif selama satu dekade terakhir tapi kenyataannya tidak selalu diiringi dengan

penurunan angka kemiskinan secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi belum cukup menurunkan kemiskinan tanpa distribusi yang adil dan intervensi sosial yang efektif. Di sinilah peran belanja bantuan sosial menjadi penting sebagai alat mitigasi sosial untuk kelompok rentan yang tidak secara langsung merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan menjadi variabel kunci yang tidak bisa diabaikan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, semakin timpang pendapatan semakin sulit upaya menurunkan kemiskinan sekalipun ekonomi secara agregat mengalami pertumbuhan. Sehingga, diperlukan analisis komprehensif terhadap keterkaitan PDRB, belanja bantuan sosial, dan ketimpangan untuk memahami dinamika kemiskinan di Jawa Timur. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, BELANJA BANTUAN SOSIAL, KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah secara parsial Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Bantuan Sosial, Ketimpangan Distribusi Pendapatan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah secara simultan Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Bantuan Sosial, Ketimpangan Distribusi Pendapatan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Bantuan Sosial, Ketimpangan Distribusi Pendapatan secara parsial terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Bantuan Sosial, Ketimpangan Distribusi Pendapatan secara simultan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis, yaitu untuk melatih dan mengembangkan pola pikir ilmiah, serta menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga sebagai saran media untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang pentingnya peran variabel dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan.